

Baubau Lampau Target Nasional Penerbitan 32 Ribu Kartu Identitas Anak, Masuk Peringkat Kedua di Sultra



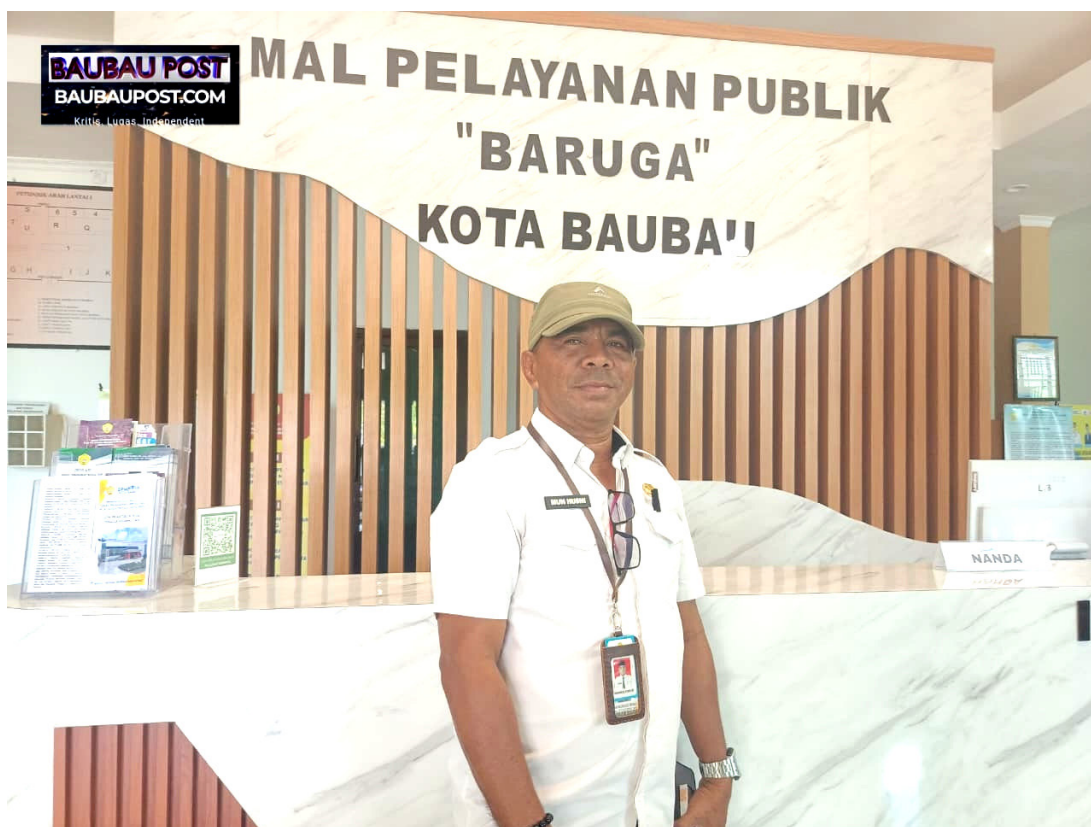
Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP-Kota Baubau mencatat kemajuan signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan setelah pencapaian penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) menembus angka 65,09 persen. Capaian tersebut bukan hanya memenuhi target nasional sebesar 60 persen, tetapi juga mengantarkan Baubau sebagai peringkat kedua tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2025.

Keberhasilan ini menjadi bagian dari upaya panjang pemerintah dalam mendorong digitalisasi dan keteraturan data kependudukan. Secara nasional, program KIA mu-

Lanjut ke Hal: 7

Cegah Konflik Warga, Baubau Terapkan Aturan Tambahan untuk Izin Tempat Hiburan Malam



Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Baubau menerapkan persyaratan tambahan di luar sistem perizinan online bagi Tempat Hiburan Malam (THM). Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah konflik sosial serta memastikan kegiatan

usaha tidak menimbulkan keberatan dari masyarakat sekitar.

Langkah tersebut menjadi penting mengingat pertumbuhan sektor hiburan di sejumlah kota sering kali berpotensi memicu gesekan sosial. Dalam konteks nasional, berbagai daerah seperti Bandung dan Surabaya pernah menetapkan aturan serupa pada 2017-2020

guna menjaga ketertiban lingkungan. Secara global, kota-kota besar seperti Seoul dan Tokyo juga menerapkan izin berlapis untuk mencegah gangguan keamanan malam hari.

Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan DPMPTSP Kota Baubau, Muhammad Husni, mengatakan penerapan per-

Lanjut ke Hal: 7

OPINI

Di Balik Angka, Ada Kehidupan: Kisah Ekonomi Buton Selatan



Oleh:
Wiwi Siu Kaimudin, SE, M.Si
Statistisi Ahli Muda BPS
Kabupaten Buton Selatan.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berbicara melalui angka. Di Kabupaten Buton Selatan, pertumbuhan itu hadir dalam cerita masyarakatnya, tentang tangan-tangan yang bekerja, harapan akan penghidupan yang lebih baik, dan perjuangan yang terus dilanjutkan demi kehidupan yang lebih layak.

Ekonomi daerah hidup ketika nelayan berangkat melaut sebelum matahari terbit, ketika petani mengolah lahan dengan harapan panen yang baik, ketika ibu-ibu membuka usaha kecil di

rumah, dan ketika pemerintah daerah menggerakkan pembangunan. Semua aktivitas itu kemudian dirangkum dalam satu indikator yang sering kita

dengar dengan sebutan pertumbuhan ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2024 perekonomian Kabupaten Buton Selatan tumbuh sebesar 4,84 persen. Angka ini menunjukkan bahwa roda ekonomi terus berputar. Namun, pertanyaan yang lebih penting bukanlah seberapa tinggi angka itu, melainkan seberapa jauh pertumbuhan tersebut dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Dari pertumbuhan tersebut, sebesar 33,71 persen disumbangkan oleh sektor perta-

Lanjut ke Hal: 7

Penantian 11 Tahun, Akhirnya Buton Selatan Mulai Bangun Kantor Bupati pada 2026, La Ode Harwanto:Ini Program Strategis Pemerintah Busel Dibawah Kepemimpinan Bupati H Muh Adios



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) memastikan pembangunan Kantor Bupati definitif akan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Proyek tersebut akhirnya diprioritaskan dan masuk dalam program strategis pemerintah Busel di bawah kepemimpinan Bupati H. Muh Adios, S.Sos, dimana setelah lebih dari satu dekade daerah itu berdiri tanpa gedung pusat pemerintahan yang permanen.

Keputusan tersebut muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional dan penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD). Namun pemerintah daerah menegaskan pembangunan kantor bupati tetap harus direal-

isasikan karena menyangkut pelayanan publik dan identitas kelembagaan pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah Buton Selatan, La Ode Harwanto, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan amanat strategis pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati H. Muh. Adios, S.Sos. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu hadirnya kantor bupati yang layak. "Ini adalah doa masyarakat selama 11 tahun. Insya Allah 2026 kita mulai pembangunannya," ujarnya.

Rencana pembangunan tersebut diputuskan menggunakan skema pembiayaan multiyears selama tiga tahun. Opsi ini dipilih karena kemampuan fiskal daerah yang terbatas serta kebijakan penghematan

anggaran di level nasional. "Dari sisi hukum dan prosedur, semuanya sudah terpenuhi dan telah disepakati oleh seluruh anggota DPRD," kata Harwanto.

Lokasi pembangunan ditetapkan di Laompo, Kecamatan Batauga. Penetapan tersebut bukan tanpa dasar. Undang-Undang Nomor 16 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan telah menetapkan Batauga sebagai ibu kota kabupaten. Secara geografis, wilayah itu berada pada titik strategis yang menghubungkan tujuh kecamatan di Busel.

Harwanto menambahkan bahwa penentuan lokasi sudah melalui kajian teknis oleh Dinas PUPR. Kajian itu mencakup analisis kontur tanah, kondisi geologi, hingga aspek es-

Lanjut ke Hal: 7

Baubau Lampau Target Nasional Penerbitan 32 Ribu Kartu Identitas Anak, Masuk Peringkat Kedua di Sultra

lai digencarkan sejak 2016 sebagai langkah untuk menyelaraskan sistem identitas penduduk sejak dini, mengikuti praktik di sejumlah negara seperti Korea Selatan dan Jepang yang lebih dulu menerapkan kartu identitas anak berskala nasional.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Baubau, Arif Basari, menjelaskan bahwa jumlah anak di kota tersebut mencapai 49.744 jiwa. Dari total itu, sebanyak 32.380 anak telah memiliki KIA. "Kita sudah berada di atas standar yang ditetapkan pusat, dan ini menjadi bukti pelayanan administrasi di Baubau semakin cepat dan tepat," ujarnya, Rabu (4/2/2025).

Di wilayah Sulawesi Tenggara, Baubau berada satu tingkat di bawah Kabupaten Konawe Utara yang lebih dahulu menembus target nasional. Pencapaian ini juga mencerminkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya identitas kependudukan bagi anak.

KIA sendiri merupakan identitas re-

smi bagi anak usia nol hingga 17 tahun kurang satu hari. Dokumen ini memiliki fungsi serupa kartu identitas nasional dewasa dan menjadi dasar penting dalam berbagai layanan publik. "Anak yang belum genap 17 tahun tetapi sudah berkuliah atau bersekolah di luar daerah tetap bisa menggunakan KIA sebagai identitas valid," terang Arif.

Capaian Baubau tahun 2025 disebut sebagai salah satu peningkatan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari penyediaan sarana pencetakan yang kini jauh lebih memadai dibandingkan periode awal implementasi KIA. Pada tahun berjalan, Dukcapil Baubau mencetak lebih dari 13 ribu kartu.

Manfaat KIA mencakup berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pembukaan rekening tabungan anak, layanan kesehatan, hingga kebutuhan perjalanan. Dokumen ini juga krusial dalam kondisi darurat. "Jika seorang anak mengalami musibah dan ditemukan membawa KIA, data identitas dan orang tuanya

langsung bisa ditelusuri," jelasnya.

Pada level internasional, penggunaan kartu identitas anak merupakan standar global yang telah diterapkan antara lain di negara-negara Uni Eropa. Sebagian besar sistem administrasi modern mengintegrasikan data anak sejak kelahiran untuk memudahkan akses jaminan sosial, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.

Untuk persyaratan penerbitan, anak usia 0 - 5 tahun cukup membawa Kartu Keluarga tanpa pas foto. Sementara anak usia 5 hingga 17 tahun kurang satu hari wajib melampirkan foto berukuran 2x3 atau 3x4. Foto dalam Kartu ini memiliki perbedaan warna berdasarkan tahun kelahiran, yakni merah untuk kelahiran ganjil dan biru untuk kelahiran genap.

Proses pencetakan KIA di Baubau dapat diselesaikan dalam satu hari, selama sarana pendukung tersedia. Kecepatan layanan ini sekaligus memperkuat integrasi data kependudukan anak dalam sistem nasional yang telah terhubung dengan identitas digital.

Selain menerbitkan KIA, Dukcapil Baubau juga memberikan tiga dokumen sekaligus ketika ada pengurusan administrasi anak, yaitu Kartu Keluarga baru, Akta Kelahiran, dan KIA. Jika pengurusan dilakukan untuk anak kedua namun anak pertama belum memiliki KIA, maka keduanya langsung dicetak bersamaan.

Tahun 2026, Baubau dipastikan masih memiliki stok blangko yang cukup dari pengadaan 2025. "Kami baru akan melakukan pengadaan tambahan jika stok yang ada sudah menipis," kata Arif.

Ia berharap seluruh anak di Kota Baubau dapat memiliki KIA sebagai bagian dari tata kelola penduduk yang akurat. "Target kami jelas, seluruh sekitar 49 ribu anak di Baubau harus terdata melalui KIA," tegasnya.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi administrasi Indonesia menuju sistem identitas tunggal yang terintegrasi penuh secara digital, sejalan dengan reformasi kependudukan global.*

Di Balik Angka, Ada Kehidupan: Kisah Ekonomi Buton Selatan

nian, kekhutan, dan perikanan, menunjukkan peran penting sektor primer dalam menopang ekonomi daerah.

Struktur ekonomi Buton Selatan masih sangat bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor yang menjadi sandaran hidup sebagian besar masyarakat. Di sinilah ekonomi daerah benar-benar berdenyut. Ketika hasil panen baik dan laut memberi hasil, harapan tumbuh. Namun ketika harga jatuh atau distribusi terhambat, beban hidup terasa semakin berat.

Ekonomi yang tumbuh memerlukan kebijakan yang mampu menghubungkan produksi dengan kesejahteraan. Tanpa penguatan di tingkat daerah, manfaat aktivitas ekonomi berisiko dinikmati di luar wilayahnya. Peran kebijakan menjadi penting agar nilai yang dihasilkan tetap berputar di daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Buton Selatan tercermin dari perkembangan angka kemiskinan yang selalu berkaitan erat dengan dinamika jumlah penduduk. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2024 tercatat sekitar 101.190 jiwa, dan meningkat menjadi sekitar 102.790 jiwa pada tahun 2025.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar

11.500 jiwa, dengan persentase penduduk miskin berada pada kisaran 14,28 persen. Setahun kemudian, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin menurun menjadi 13,64 persen pada tahun 2025. Penurunan sebesar 0,64 poin persentase ini setara dengan berkurangnya sekitar 500 jiwa penduduk miskin, sehingga jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sekitar 11 ribu jiwa.

Artinya, ada masyarakat yang mulai bangkit, tetapi ada pula yang masih berjuang keras agar tidak kembali terjatuh. Data kedalaman dan keparahan kemiskinan yang menurun memberi harapan bahwa kondisi kelompok miskin perlahan membaik. Namun harapan itu perlu dijaga agar tidak padam oleh tekanan harga dan keterbatasan akses ekonomi.

Pola pertumbuhan ekonomi Buton Selatan juga mengajarkan kita satu hal penting pembangunan membutuhkan ritme yang konsisten. Aktivitas ekonomi cenderung melambat di awal tahun, seiring dengan belum optimalnya realisasi belanja dan kegiatan pembangunan. Ketika program mulai berjalan, ekonomi ikut bergerak. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan, setiap percepatan, dan setiap keberpihakan kebijakan memiliki dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Di sinilah data statistik menemukan maknanya. Angka-angka yang disajikan BPS bukan untuk

menghakimi, melainkan untuk mengingatkan, tentang apa yang sudah membaik dan apa yang masih perlu diperjuangkan. Data menjadi cermin agar pembangunan tidak kehilangan arah dan tetap berpihak pada mereka yang paling membutuhkan.

Ke depan, Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Buton Selatan untuk memotret denyut usaha dan kerja masyarakat secara lebih utuh dan akurat. Ekonom peraih Nobel Simon Kuznets menegaskan pentingnya pengukuran ekonomi yang tepat, sementara tokoh statistik modern W. Edwards Deming menyatakan bahwa keputusan yang baik tidak mungkin lahir tanpa data yang baik. Oleh karena itu, partisipasi aktif pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghasilkan potret ekonomi yang tajam dan kebijakan yang tepat sasaran. Better data leads to better decisions, karena data yang berkualitas adalah fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Dukungan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan tumbuh sebagai ikhtiar kolektif. Ketika data dijadikan pijakan, kebijakan dijalankan dengan keberpihakan, dan masyarakat terlibat secara aktif, Buton Selatan memiliki peluang besar untuk melangkah menuju daerah yang kuat secara ekonomi, berdaya saing, dan bermartabat.*

Penantian 11 Tahun, Akhirnya Buton Selatan Mulai Bangun Kantor Bupati pada 2026, La Ode Harwanto:Ini Program Strategis Pemerintah Busel Dibawah Kepemimpinan Bupati H Muh Adios

tetika kawasan. "Yang paling penting adalah kaidah hukum sudah jelas dan kajian teknisnya kuat," tegasnya.

Dari sisi aksesibilitas, lokasi Laompo dinilai strategis karena dekat dengan pelabuhan utama di Batauga. Akses transportasi ini mempermudah masyarakat dari wilayah kepulauan seperti Batu Atas untuk mengurus pelayanan pemerintahan. Menurut Harwanto, "Fungsi utama kantor bupati adalah pelayanan, dan lokasi ini mendukung itu."

Penyusunan anggaran pembangunan telah dibahas sejak 2025 melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemerintah awalnya menargetkan proyek rampung dalam dua tahun, namun revisi dilakukan untuk menyesuaikan realitas fiskal. Perpanjangan durasi pembangunan menjadi tiga tahun diharapkan membuat perencanaan lebih matang.

Secara historis, Indonesia bukan kali pertama menerapkan skema multiyears untuk pembangunan ge-

dung pemerintahan. Kompleks Parlemen di Senayan misalnya, dibangun secara bertahap sejak 1965 hingga 1983 karena keterbatasan anggaran. Di tingkat global, Malaysia menerapkan pola serupa saat membangun pusat pemerintahan Putrajaya pada awal 1990-an yang rampung dalam beberapa tahap dan bertahun-tahun.

Pemerintah Buton Selatan berharap keberadaan kantor bupati dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat identitas

kelembagaan daerah otonom. Gedung pemerintahan yang representatif, menurut banyak studi tata kelola pemerintahan global, memiliki korelasi dengan efektivitas layanan dan efisiensi birokrasi.

Dengan dimulainya pembangunan pada 2026, pemerintah daerah meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat. "Ini proyek bersama, bukan hanya pemerintah. Kami berharap dukungan masyarakat agar pembangunan berjalan lancar," ujar Harwanto menutup wawancara.*

diakan foto tampak depan, belakang, dan samping bangunan, termasuk rumah-rumah yang berdekatan. "Minimal dua rumah pada satu sisi dan tiga rumah di sisi lainnya harus terlihat dalam dokumentasi. Ini untuk memetakan kondisi sebenarnya di lapangan," jelas Husni.

Ia menegaskan bahwa proses pengajuan izin tetap dapat dilakukan melalui sistem OSS. Namun, izin tidak akan diterbitkan sebelum seluruh persyaratan tambahan terpenuhi. "Secara sistem, pemohon mungkin sudah lolos tahap verifikasi. Tapi bagi kami, izin belum selesai sebelum syarat tambahan kami penuhi. Ujung keputusan tetap di DP-MPTSP," tegasnya.

Kebijakan ini juga diberlakukan pada proses perpanjangan izin. Bahkan, pelaku usaha yang sebelumnya tidak diminta melampirkan dokumen tambahan pada izin

awal kini tetap diwajibkan memenuhinya. DP-MPTSP menilai hal tersebut sejalan dengan kebutuhan pengawasan yang lebih ketat terhadap usaha yang berpotensi mempengaruhi kondisi sosial masyarakat.

Pengetatan seperti ini bukan hal baru dalam regulasi perizinan. Pada 2019, Kementerian Dalam Negeri pernah mengeluarkan surat edaran yang mendorong pemerintah daerah melakukan pengawasan ekstra terhadap sektor hiburan guna mencegah peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan gangguan ketertiban umum. Di tingkat internasional, sejumlah kota di Eropa seperti Berlin menerapkan zona khusus untuk aktivitas malam sebagai bagian dari manajemen risiko sosial.

Menurut Husni, tambahan syarat ini juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam

menciptakan iklim usaha yang aman namun tetap kondusif. "Kami menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kenyamanan masyarakat. Itu prinsip utama kami," ujarnya.

Ia memastikan kebijakan ini bukan untuk mempersulit pelaku usaha, melainkan mencegah masalah jangka panjang. Selain itu, mekanisme dialog langsung antara dinas dan pemohon membuat komunikasi lebih terbuka dan potensi miskomunikasi dapat diminimalisir.

DP-MPTSP Baubau berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas pemetaan sosial sebelum izin diterbitkan sehingga pelaku usaha mengetahui risiko serta kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, keberadaan THM di Baubau tetap dapat berjalan secara tertib, aman, dan sesuai koridor hukum.*

Cegah Konflik Warga, Baubau Terapkan Aturan Tambahkan untuk Izin Tempat Hiburan Malam

syarat tambahan dilakukan berdasarkan evaluasi lapangan serta tingginya sensitivitas masyarakat terhadap keberadaan THM. "Izin tempat hiburan cukup sensitif. Karena itu, kami tidak ingin setelah izin keluar muncul

penolakan dari warga," ujarnya saat ditemui di Kantor DP-MPTSP Baubau, Rabu (4/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa sistem perizinan secara nasional telah lebih banyak berbasis digital melalui Online Single Sub-

mission (OSS). Namun, kebijakan teknis di tingkat daerah tetap memungkinkan adanya syarat tambahan jika dianggap penting untuk menjaga ketertiban. "Meski sistem online tidak mewajibkan beberapa dokumen, kami tetap meminta secara

administratif melalui komunikasi langsung dengan pemohon," katanya.

Salah satu syarat yang diwajibkan adalah penyampaian dokumentasi lingkungan sekitar lokasi usaha sebelum izin difinalisasi. Pemohon harus menye-

Partai-Partai di DPR Beda Arah Soal Penghapusan Parliamentary Threshold



Laporan: Hamid

JAKARTA, BP-Perdebatan mengenai keberlanjutan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kembali mengemuka di DPR seiring pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang masuk Prolegnas 2026. Sejumlah partai politik memiliki pandangan beragam, mulai dari usulan penghapusan hingga kenaikan angka ambang batas.

Ambang batas parlemen merupakan persentase minimal perolehan suara nasional yang wajib diraih partai politik untuk dapat menempatkan wakilnya di DPR. Wacana penghapusannya kembali mendapat sorotan setelah dinilai berdampak pada representasi suara pemilih.

Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang menyatakan belum mengambil sikap resmi. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut fraksi masih mengkaji opsi yang tersedia. Namun, ia secara pribadi menilai ambang batas tetap diperlukan.

Menurut Herman, keberadaan PT penting untuk menjaga penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen. Ia menegaskan besaran PT akan ditetapkan melalui kesepakatan antara DPR dan pemerintah, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyerahkan teknis penentuannya kepada pembentuk undang-undang.

Berbeda dengan Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) secara tegas mendorong penghapusan PT. Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menilai ambang batas selama ini menyebabkan jutaan suara pemilih tidak terkonsolidasi menjadi kursi di DPR. PAN, yang memiliki 48 kursi, juga konsisten mengusulkan penghapusan ambang batas pemilihan presiden.

PDI Perjuangan mengambil posisi sebaliknya. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menolak penghapusan PT dan menilai mekanisme tersebut penting untuk konsolidasi demokrasi, terutama dalam sistem presidensial. Meski begitu, PDIP masih mengkaji

kemungkinan penyediaan besaran angka PT.

Golkar juga menolak wacana penghapusan. Sekjen Golkar M. Sarmuji menyebut PT adalah instrumen demokratis untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian. Ia menilai penghapusan PT justru berpotensi menciptakan sistem multipartai ekstrem yang menghambat efektivitas pemerintahan.

Di sisi lain, PKB menyatakan kekhawatiran bahwa penghapusan PT akan membuat jumlah partai di parlemen semakin banyak. Anggota Komisi II dari PKB, Muhammad Khozin, menilai usulan tersebut sah sebagai bagian dari diskursus revisi UU Pemilu, namun bukan pilihan ideal untuk menjaga stabilitas ideologis fraksi.

PKS menegaskan bahwa PT masih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Sekjen PKS M. Kholid menyebut PT berperan penting mengurangi fragmentasi berlebihan di parlemen sehingga proses

legislasi tetap efektif.

Partai NasDem bahkan mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan. Ketua Komisi II DPR dari NasDem, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyebut angka moderat berada di kisaran 6-7 persen dan dapat diberlakukan hingga tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Ia menilai penguatan struktur partai menjadi konsekuensi dari penerapan PT.

Sementara itu, Partai Gerindra belum menyatakan sikap resmi terkait masa depan PT. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya masih menyusun berbagai simulasi dan mencermati masukan publik selama pembahasan awal revisi UU Pemilu berlangsung di DPR.

Dengan beragam sikap tersebut, pembahasan mengenai ambang batas parlemen diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam proses revisi UU Pemilu. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada dinamika politik dan kesepakatan partai-partai bersama pemerintah. (*)

Ambang Batas Parlemen Dinilai Relevan, Demokrat Minta Kajian Matang

JAKARTA-Penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinilai Partai Demokrat sebagai mekanisme penting dalam menjaga kualitas kerja lembaga legislatif. Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, saat menanggapi kembali munculnya usulan penghapusan ambang batas parlemen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Wacana tersebut muncul seiring proses penyusunan RUU Pemilu yang sedang dibahas di Komisi II DPR. Sejumlah pihak mengusulkan agar ambang batas parlemen dihapus agar tidak ada suara rakyat yang terbuang. Namun, Demokrat melihat perlunya kajian lebih mendalam sebelum kebijakan itu diubah.

Dede menegaskan bahwa ambang batas parlemen merupakan praktik yang lazim diterapkan dalam sistem pemilu proporsional di banyak negara dunia. Ia mengatakan penerapan ambang batas biasanya berada pada kisaran 4 hingga 7 persen, tergantung kebutuhan politik masing-masing negara.

"Ambang batas parlemen adalah sebuah keniscayaan yang terjadi di seluruh dunia, kecuali Finland yang nol persen," ujar Dede

politik DPR terpecah terlalu luas. "Yang jelas menurut kami bahwa ambang batas tetap dibutuhkan," ucapnya.

Kholid menambahkan, tanpa PT, proses legislasi dan pengambilan keputusan bisa mengalami jalan buntu (deadlock) lantaran jumlah fraksi terlalu banyak dan tidak terkelola secara efektif. PKS, katanya, masih mengkaji apakah angka empat persen yang berlaku saat ini perlu direvisi.

Dari Fraksi PKB, anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin juga menolak gagasan nol persen. Ia menilai penghapusan ambang batas justru berpotensi melahirkan sistem multipartai ekstrem, bukan multipartai sederhana. Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan spirit Mahkamah Konstitusi.

Khozin menegaskan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak memerintahkan penghapusan ambang batas parlemen. Putusan itu justru menekankan

di kompleks parlemen, Selasa (3/2).

Menurutnya, keberadaan ambang batas membantu mencegah fragmentasi politik yang terlalu besar di parlemen. Ia menilai, tanpa regulasi tersebut, potensi munculnya banyak fraksi dapat membuat peta kekuatan politik menjadi kabur.

"Kalau fraksinya terlalu banyak, kita bisa kesulitan melihat mana yang pendukung pemerintah dan mana yang menjadi oposisi," katanya menambahkan.

Secara historis, Indonesia pernah menerapkan ambang batas parlemen sangat rendah, yakni 2,5 persen pada Pemilu 2009. Namun, ketika aturan itu diberlakukan, sebanyak 19 juta suara pemilih tetap tidak terkonsolidasi menjadi kursi DPR karena tidak memenuhi batas minimum. Catatan itu menjadi salah satu alasan mengapa Dede menilai perlu ada evaluasi matang jika ambang batas ingin diadopsikan.

"Karena kuncinya bukan pada PT-nya. Kita punya pengalaman 2009, ketika 2,5 persen saja 19 juta suara terbuang," ujarnya.

Di tingkat global, sejumlah negara Eropa juga menerapkan ambang batas untuk mencegah parlemen menjadi terlalu gemuk. Jerman misalnya, menerapkan threshold 5 persen sejak 1953 un-

an penyaluran sistem pemilu agar lebih proporsional dan tetap mendorong penyederhanaan partai politik. "Isu utamanya adalah sistem pemilu yang proporsional agar suara pemilih tidak hilang," jelas Khozin.

Dalam konteks sejarah pemilu Indonesia, ambang batas parlemen mulai diterapkan pada Pemilu 2009 dengan angka 2,5 persen. Angka ini kemudian meningkat menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014 dan 4 persen pada Pemilu 2019 serta 2024. Penerapan PT saat itu dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen, yang sebelumnya sempat mencapai lebih dari 20 partai pada era awal Reformasi.

Secara internasional, sejumlah negara juga menerapkan parliamentary threshold sebagai mekanisme stabilitas politik. Jerman, misalnya, menetapkan ambang batas 5 persen pasca Perang Dunia II untuk menghindari fragmentasi

menjaga stabilitas pemerintahan koalisi. Turki bahkan pernah menetapkan ambang batas 10 persen pada era 1980-an untuk mengurangi polarisasi pasca konflik politik.

Kendati demikian, Dede menegaskan bahwa Demokrat belum menetapkan sikap final dalam pembahasan RUU Pemilu. Ia menyebut fraksinya masih menanti hasil kajian dan dinamika pembahasan di Komisi II DPR. Menurutnya, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan stabilitas politik sekaligus efektivitas representasi rakyat.

"Saya mewakili Demokrat belum bisa mengambil keputusan apa pun karena kita masih menguji dulu," kata Dede.

Ia menambahkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu jauh lebih penting dibanding perdebatan mengenai besar atau kecilnya ambang batas. Baginya, suara rakyat hanya akan efektif jika tingkat partisipasi pemilih meningkat secara signifikan.

Hingga kini, pembahasan RUU Pemilu masih terus berlangsung. Setiap fraksi diperkirakan akan menyampaikan sikap resmi setelah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dituntaskan. Keputusan akhir nantinya akan menentukan arah sistem perwakilan politik Indonesia di pemilu mendatang. (a1)

si yang pernah melemahkan Republik Weimar. Turki bahkan menerapkan ambang batas 7 persen untuk memastikan kekuatan parlemen tetap terstruktur.

Melihat pengalaman tersebut, DPR memprediksi pembahasan RUU Pemilu tahun ini tidak akan menjadikan wacana penghapusan PT sebagai isu pokok. Fokus diperkirakan akan mengarah pada proporsionalitas sistem pemilu dan efektivitas representasi politik. Proses itu diharapkan menghasilkan formula baru yang sejalan dengan prinsip keadilan pemilih dan stabilitas pemerintahan.

Hingga kini, fraksi-fraksi yang menolak PT nol persen sama-sama membuka ruang kajian mengenai angka ideal, namun sepakat mempertahankan keberadaan ambang batas. Pembahasan resmi di Komisi II dijadwalkan berlangsung dalam rangkaian agenda legislasi sepanjang tahun. (*)

Mayoritas Fraksi DPR Menolak PT Nol Persen, Soroti Risiko Fragmentasi Politik

WACANA penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi nol persen mendapat penolakan dari sejumlah fraksi besar di DPR. Penolakan disampaikan setelah isu revisi Undang-Undang Pemilu mulai dibahas menjelang agenda legislasi tahun ini.

Penolakan terbaru datang dari Partai Golkar, PKB, dan

PKS, yang menilai keberadaan ambang batas masih relevan untuk menjaga stabilitas politik. Sikap ini memperkuat pandangan PDIP yang lebih dulu menyatakan keberatan atas wacana penghapusan PT.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan partainya tetap memandang ambang batas sebagai instrumen penting bagi penyederhanaan sistem

multipartai. "Angka nanti bisa dibicarakan ya, angkanya bisa dibicarakan berapa yang bisa disepakati bersama," ujarnya di kompleks parlemen, Rabu (4/2).

Menurut Sarmuji, sistem multipartai sederhana merupakan model yang paling kompatibel dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Ia menilai tanpa ambang batas parlemen, proses pengambilan keputusan politik ber-

potensi semakin terfragmentasi. "Golkar pasti akan setuju pada instrumen yang mendorong multipartai sederhana," katanya.

Sementara itu, PKS menyampaikan argumen berbeda namun selaras. Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai ambang batas diperlukan sebagai penopang efektivitas pemerintahan. Ia menegaskan keberadaan PT mencegah sikap

Linguistik Forensik Jadi Fokus Kerja Sama Kominfo dan UHO



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Upaya menghadirkan kajian ilmiah yang objektif dalam merespons dinamika wacana publik mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara menjajaki kolaborasi strategis dengan Balai Bahasa Sultra serta Universitas Halu Oleo (UHO).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menegaskan bahwa ruang publik saat ini dipenuhi berbagai narasi yang kerap memicu kebisingan informasi, konflik tafsir, hingga potensi disharmoni sosial. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pandangan akademik yang jernih dan berbasis ilmu pengetahuan.

Sebagai tindak lanjut, Kominfo Sultra menggalas pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas institusi yang akan melibatkan Balai Bahasa, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Budaya UHO. Pokja ini dirancang menjadi wadah kajian, edukasi publik, serta anal-

isis ilmiah terhadap adap persoalan kebahasaan dan wacana yang berkembang di media massa maupun media sosial.

Gagasan tersebut mendapat sambutan positif dari lingkungan akademik. Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO, Dr. Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si., menilai inisiatif ini sebagai langkah strategis yang relatif baru dan membuka ruang kontribusi akademik yang lebih luas bagi dunia kampus dalam mendukung kebutuhan pemerintah daerah.

“Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi ini. Selain bermanfaat bagi pengembangan akademik, kerja sama ini juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Dukungan serupa disampaikan Dekan Fakultas Hukum UHO, Dr. Guasman Tawu, S.H., M.H. Ia menyatakan bahwa dunia akademik memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam memberi tafsir ilmiah terhadap isu-isu kebahasaan yang kerap bersinggungan dengan perso-

alan hukum.

“Kami siap berkolaborasi. Dalam praktik hukum, tidak selalu terdapat tafsir tunggal, sehingga dialog akademik menjadi sangat penting untuk memahami isu secara lebih komprehensif,” katanya.

Komitmen kerja sama tersebut dibangun melalui rangkaian kunjungan kerja yang dilakukan Plt. Kadis Kominfo Sultra pada akhir Januari 2026. Pada Senin, 27 Januari 2026, Andi Syahrir mengunjungi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, disusul kunjungan ke Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya UHO pada Selasa, 28 Januari 2026.

Di Balai Bahasa Sultra, Andi Syahrir disambut langsung oleh Kepala Balai Bahasa, Dewi Pridayanti, bersama jajaran. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dalam penguatan kebijakan kebahasaan, termasuk pengembangan kajian linguistik forensik.

Dewi Pridayanti menyampaikan bahwa Balai Bahasa Sultra pada prinsipnya sangat terbuka ter-

hadap kerja sama lintas lembaga, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah.

Ia bahkan menegaskan bahwa Balai Bahasa Sultra siap memberikan layanan kebahasaan, seperti telaah dokumen, pendampingan bahasa, hingga pelatihan kebahasaan kepada instansi pemerintah tanpa dipungut biaya.

Lebih jauh, Dewi berharap kolaborasi yang terbangun nantinya tidak hanya berfokus pada linguistik forensik, tetapi juga turut mendorong implementasi Trigatra Bangun Bahasa, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan dunia akademik tersebut, Kominfo Sultra berharap dapat memperkuat kualitas literasi publik serta menghadirkan ekosistem komunikasi yang lebih sehat, rasional, dan berbasis keilmuan di ruang publik digital. (*)

Akselerasi SDM: Sultra Perkuat Dukungan Pembangunan Sekolah Garuda



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan dukungan penuh terhadap Program Sekolah Garuda melalui penguatan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi resmi di Gedung D Kementerian Dikawasan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka memaparkan kesiapan daerah untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan unggulan yang menjadi inti dari Program Sekolah Garuda. Ia menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah demi menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif. “Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung sepenuhnya Program Sekolah Garuda karena merupakan kebutuhan masyarakat,” ujar Andi.

Program Sekolah Garuda sendiri merupakan model pendidikan yang menekankan kualitas akademik, karakter, dan pemanfaatan teknologi. Konsep sekolah unggulan semacam ini telah menjadi standar di beberapa negara, seperti Korea Selatan dan Finlandia, yang sejak dekade 1990-an menerapkan sistem pendidikan berbasis kompetensi untuk meningkatkan daya saing generasi muda.

Dalam audiensi tersebut, Mendikawasan RI Prof. Brian Yuliarto menyambut baik komitmen kuat Pemrov Sultra. Ia

meminta agar pengawasan pembangunan dilakukan secara ketat untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program. “Kami berharap Pemrov Sulawesi Tenggara terus memantau keamanan serta pemberdayaan masyarakat lokal selama proses pembangunan berjalan,” kata Brian.

Sebagai langkah awal, Pemrov Sultra telah menyiapkan pembangunan sekolah unggulan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA yang akan menjadi titik implementasi Sekolah Garuda di daerah. Pembangunan ini dirancang tidak hanya untuk menyediakan fasilitas modern, tetapi juga mendorong budaya belajar yang kreatif dan adaptif.

Selain itu, Pemrov Sultra juga menyiapkan empat SMA transformasi yang masuk dalam skema penguatan program tersebut. SMA transformasi diharapkan menjadi pusat pengembangan kualitas akademik yang lebih maju di setiap kabupaten dan kota strategis.

Dukungan provinsi juga diperkuat melalui penyediaan beasiswa gratis bagi mahasiswa berprestasi. Pada tahap awal, Pemrov menetapkan 100 mahasiswa sebagai penerima, dengan target total 1.000 orang dalam beberapa tahun mendatang. Beasiswa ini mencakup pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dalam negeri maupun luar negeri.

Gubernur Andi menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah prioritas pembangunan jangka panjang Sulawesi Tenggara. Program beasiswa telah menjadi strategi nasional sejak era

Presiden Soeharto pada awal 1980-an, ketika pemerintah mulai mengirimkan pelajar Indonesia belajar ke Eropa dan Amerika untuk memperkuat kapasitas nasional.

Pemrov Sultra juga memastikan dukungan infrastruktur fisik dengan memfasilitasi pelebaran jalan menuju Sekolah Garuda di Kabupaten Konawe Selatan. Proyek itu direncanakan mulai dikerjakan pada Maret 2026. “Kami siap mendukung kebutuhan aksesibilitas agar program ini berjalan efektif,” tutur Gubernur.

Selain itu, pemerintah daerah mengemukakan agar alumni Sekolah Garuda yang telah berhasil nantinya kembali mengabdikan untuk membangun daerah. Konsep ini meniru sistem return service yang telah lama diterapkan di Jepang dan Singapura, di mana lulusan program unggulan diwajibkan berkontribusi kepada negara selama periode tertentu.

Mendikawasan Prof. Brian menegaskan bahwa kementerian akan terus berkoordinasi dengan Pemrov Sultra untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target. Ia bahkan menyampaikan rencana kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat. “Kami ingin melihat langsung progres pembangunan di Kabupaten Konawe,” tegasnya.

Pertemuan antara keduanya diharapkan menjadi momentum kuat untuk mendorong visi pendidikan unggulan di Sulawesi Tenggara. Dengan sinergi berkelanjutan antara pusat dan daerah, Program Sekolah Garuda diproyeksikan menjadi model pendidikan modern yang mampu melahirkan generasi masa depan yang kompetitif secara nasional maupun global. (*)

SDN 1 Masiri Buton Selatan Optimalkan KKA dan Pelatihan Kompetensi Guru Melalui BOS Kinerja



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Upaya peningkatan kualitas pembelajaran kembali menjadi prioritas SD Negeri 1 Masiri, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, pada awal 2026. Sekolah ini memaksimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja untuk memperkuat kapasitas guru sebagai garda terdepan implementasi Kurikulum Merdeka.

Langkah tersebut selaras dengan arah kebijakan nasional yang menekankan penguatan sumber daya manusia pendidikan setelah program Sekolah Penggerak resmi dihentikan pada 2023. Pemerintah kemudian mengalihkan dukungan melalui BOS Kinerja yang secara nasional mulai diperluas sejak 2024.

Kepala SD 1 Masiri, Jalaluddin S.Pd, menjelaskan bahwa dana BOS Kinerja yang diterima sekolah pada tahun ini mencapai Rp22.500.000. Seluruh alokasi tersebut diarahkan sepenuhnya untuk peningkatan kompetensi guru, tanpa diperbolehkan digunakan untuk pengadaan sarana elektronik. "Dana ini memang fokus

untuk kapasitas guru, bukan pembelian perangkat," ujar Jalaluddin.

Ia menuturkan bahwa bentuk pelatihan yang wajib diikuti mencakup pembelajaran mendalam (deep learning) dan Komunitas Belajar (KKA). Kegiatan pembelajaran mendalam diikuti oleh tiga peserta dari sekolah, yakni kepala sekolah dan dua guru. Sementara untuk KKA, satu guru kelas V menjadi perwakilan sesuai ketentuan program.

Pelatihan tersebut bukan hanya formalitas, tetapi menjadi dasar bagi guru dalam menerapkan pendekatan belajar yang lebih berpusat pada siswa. "Pendekatan sekarang menekankan kenyamanan dan motivasi siswa. Maka gurunya dulu yang harus siap," kata Jalaluddin memberi penegasan.

Implementasi program sudah dimulai sejak Juli 2025 dan terus berlanjut hingga semester dua tahun tersebut. Buku-buku pendukung pembelajaran dibeli sejak awal pelaksanaan program agar kegiatan belajar dapat berjalan optimal tanpa hambatan materi.

Menurut Jalaluddin, rencana seko-

lah pada 2026 tetap mengikuti pola pembelajaran mendalam yang telah diterapkan. Kurikulum Merdeka masih digunakan, namun dengan penyempurnaan proses belajar yang diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Hal ini mirip dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), tetapi dengan fleksibilitas yang lebih besar pada pengaturan jam dan metode belajar.

Dalam konteks global, tren pendidikan berbasis kompetensi dan pembelajaran mendalam juga berkembang di berbagai negara. Beberapa sistem pendidikan seperti Finlandia dan Kanada telah menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Pendekatan tersebut kini menjadi rujukan banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam memperkuat kualitas guru sebagai fasilitator belajar.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan, SD 1 Masiri menerapkan Hari Belajar Guru yang digelar sekali seminggu. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi bagi seluruh guru untuk membahas kend-

ala, mengevaluasi praktik belajar, dan menyusun rencana pembelajaran berikutnya. "Biasanya berlangsung satu sampai satu setengah jam, tergantung kesepakatan sekolah," jelasnya.

Jalaluddin juga memastikan bahwa kelas VI kemungkinan baru akan dilibatkan secara penuh pada tahun ajaran baru, yang dimulai sekitar Juli 2026. Hal ini menyesuaikan persiapan guru serta modul pembelajaran yang sedang diselenggarakan.

Secara historis, Indonesia telah melakukan berbagai reformasi pendidikan sejak era Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Setiap kebijakan menekankan pentingnya kualitas guru sebagai faktor penentu keberhasilan pembelajaran "sebuah prinsip yang juga menjadi standar global UNESCO dalam agenda pendidikan dunia.

Melalui BOS Kinerja, SD 1 Masiri berharap dapat mempertahankan kualitas pembelajaran dan menjawab tuntutan perubahan sistem pendidikan. "Kami ingin memastikan guru lebih siap menghadapi dinamika pembelajaran di kelas" tutup Jalaluddin. (*)

Pemkab Buton Undi 56 Lot Pasar Kaloko, Sekda Minta Pedagang Tetap Optimis



Pewartu: Rahim

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton menggelar pencabutan lot bagi para pedagang yang akan menempati lapak di pasar sementara Kaloko, Pasarwajo, Rabu, 4 Februari 2026. Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si, mewakili Bupati Buton, sebagai bagian dari proses penataan kembali aktivitas pasar setelah kebakaran yang melanda Pasar Kaloko pada akhir 2025.

Dalam agenda resmi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penataan pasar menjadi salah satu prioritas daerah karena pasar tradisional memiliki sejarah panjang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Di Indonesia, pasar rakyat telah menjadi penopang ekonomi sejak era kerajaan Nusantara, sementara secara global, konsep pasar terbuka bermula dari tradisi perdagangan kuno di Mesopotamia dan Tiongkok.

Sekda Buton dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga semangat di tengah proses pemulihan ekonomi pascakebakaran. "Kepada ibu-ibu semua, tetap semangat. Rezeki itu akan datang dengan caranya sendiri dan tidak akan tertukar," ujar Sekda.

Pemerintah daerah juga meminta seluruh pedagang untuk tidak terpengaruh informasi yang mengarah pada anggapan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada pelaku pasar. Menurut Sekda, pemerintah justru

memberikan perhatian penuh terhadap keberlangsungan Pasar Kaloko. Ia menegaskan, "Pak Bupati selalu memantau perkembangan pasar Kaloko meski sedang berada di Jakarta menghadiri Rakornas."

Dalam pencabutan lot tersebut, sebanyak 56 lapak resmi diundi. Lapak-lapak tersebut terbagi dalam tiga segmen berdasarkan jenis dagangan. Segmen pertama terdiri atas 20 lapak pedagang sayur, segmen kedua berjumlah 28 lapak untuk pedagang hasil bumi seperti umbi-umbian dan pisang, sedangkan segmen ketiga menampung 8 lapak bagi pedagang jagung giling, pinang, tembakau, tahu, dan kerupuk.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, Asruddin, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa penempatan lapak dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan Dinas Perdagangan dari pedagang terdampak. "Setelah pencabutan lot ini, para pedagang sudah bisa menempati lapak masing-masing," kata Asruddin menjelaskan.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah masih menyiapkan penambahan lapak untuk menampung seluruh pedagang eks kebakaran Pasar Kaloko. Penambahan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan lapangan.

Sebelum pencabutan lot dimulai, kegiatan diawali dengan pembacaan doa oleh Imam Desa Takimpo. Tradisi ini mencerminkan budaya lokal yang kerap melibatkan tokoh agama dalam kegiatan masyarakat,

sebuah kebiasaan yang juga ditemukan di berbagai negara lain di Asia Tenggara dalam proses pembukaan ruang usaha baru.

Dalam bagian lain sambutannya, Sekda Buton menegaskan pentingnya menjaga kesehatan sebagai faktor utama dalam menjalankan aktivitas perdagangan. "Saya titipkan pesan agar ibu-ibu tetap menjaga kesehatan," ujarnya mengingatkan.

Selain menata lapak pedagang, Pemkab Buton juga meluncurkan program 'Rabu Belanja' yang bertujuan meningkatkan interaksi ekonomi di wilayah Pasarwajo. Program tersebut sejalan dengan strategi banyak kota di dunia yang menumbuhkan aktivitas perbelanjaan harian untuk menggerakkan perekonomian lokal.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana seluruh ASN diwajibkan berada di kantor Takawa mulai pukul 08.00 sampai 16.00 Wita. Kebijakan ini diharapkan mendorong ASN tinggal dan berbelanja di wilayah Pasarwajo sehingga memicu pertumbuhan ekonomi.

Pada penutupan acara, Sekda kembali meminta para pedagang menerima hasil undian dengan lapang dada. Menurutnya, lokasi lapak tidak menentukan keberhasilan usaha seorang pedagang. "Setelah lot ini jangan ada yang berkecil hati. Di depan atau di belakang, rezeki itu tidak akan tertukar," tegasnya. (*)

400 Ribu Kasus Baru, Pemerintah Dorong Skrining Kanker Massal



Peliput: Lisna

JAKARTA, BP-Pemerintah kembali menegaskan bahwa kanker dapat disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Peringatan ini disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin di tengah masih rendahnya minat masyarakat melakukan skrining, meskipun fasilitas kesehatan kini semakin lengkap.

Peringatan tersebut disampaikan Menkes saat membuka puncak Hari Kanker Sedunia di Square One Function, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2026). Dalam agenda ini, ia menekankan bahwa ketakutan masyarakat adalah hambatan terbesar dalam upaya penanganan kanker secara optimal.

Menurut Budi, teknologi kesehatan yang semakin canggih membuat kanker bukan lagi vonis mengerikan. "Kanker bisa disembuhkan, sama seperti penyakit lainnya. Masyarakat tidak perlu takut memeriksakan diri," tegasnya di hadapan peserta acara.

Kementerian Kesehatan mencatat, peluang kesembuhan pasien kanker stadium awal dapat mencapai lebih dari 90 persen, bergantung jenis

kanker. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sejak 2005 menekankan bahwa deteksi dini merupakan strategi global untuk menekan kasus kematian.

Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Pengendalian Penyakit, Murti Utami, menyampaikan data yang menunjukkan urgensi skrining di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa 70 persen kematian akibat kanker terjadi karena pasien datang terlambat ke fasilitas kesehatan.

"Terdapat sekitar 400 ribu kasus baru setiap tahun. Ini bukan sekadar angka, ini tentang masa depan keluarga," ujar Ami, sapaan akrabnya. Ia menambahkan bahwa kanker payudara dan kanker leher rahim masih menjadi dua penyakit dengan beban tertinggi di Indonesia.

Secara historis, kanker payudara telah menjadi penyebab kematian utama perempuan di berbagai negara. Data Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) menunjukkan pada 2020 terdapat lebih dari 2,3 juta kasus baru kanker payudara di seluruh dunia. Tren tersebut juga terlihat di Indonesia dengan jumlah kasus yang terus meningkat dalam dua dekade terakhir.

Di tingkat pembiayaan, kanker termasuk penyakit

katastropik yang memerlukan anggaran besar. Pemerintah menanggung hingga Rp5,9 triliun setiap tahun untuk perawatan pasien kanker. "Beban ini bukan hanya dirasakan negara, tetapi juga berdampak pada ekonomi keluarga," kata Ami.

Dalam rangka menurunkan angka kematian dan beban biaya tersebut, pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kanker Payudara. Program ini dipadukan dengan Cek Kesehatan Gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan skrining 40 juta perempuan berusia di atas 30 tahun di seluruh Indonesia. Namun capaian ini masih jauh dari harapan. Menkes Budi mengungkapkan bahwa hanya 4 juta perempuan yang telah datang melakukan pemeriksaan.

"Dari total yang diskrining, sekitar 1.700 teridentifikasi membutuhkan pengobatan. Mayoritas kasus ini sebenarnya bisa diselamatkan jika ditangani dengan cepat," ujar Budi. Ia kembali mengajak masyarakat untuk tidak menunggu gejala muncul sebelum melakukan pemeriksaan.

Ketua Yayasan

Kanker Payudara Indonesia (YKPI), Linda Agum Gumelar, turut hadir dalam kegiatan tersebut dan mengapresiasi upaya pemerintah. Sebagai penyintas kanker, Linda menekankan pentingnya deteksi dini. "Jika ditemukan pada tahap awal dan diobati secara medis, Anda pasti akan sehat kembali. Saya buktinya," ungkapnya.

Upaya skrining kanker sudah menjadi komitmen global. Sejak tahun 2000, komunitas internasional memperingati Hari Kanker Sedunia sebagai momentum memperkuat edukasi pencegahan. Indonesia sendiri mulai mengintensifkan program deteksi dini sejak awal 2010-an melalui Puskesmas yang kini telah dilengkapi alat mamografi dan IVA test.

Meski begitu, tantangan terbesar tetap berupa ketakutan, stigma, dan penyangkalan masyarakat. Kemenkes berkomitmen meningkatkan edukasi publik serta memperluas layanan skrining di seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil.

Dengan agenda tersebut, pemerintah berharap angka kematian akibat kanker di Indonesia dapat ditekan dalam beberapa tahun mendatang, sejalan dengan komitmen global menurunkan beban kanker di seluruh dunia. (*)

Pemerintah Perluas Layanan Skrining Kanker Gratis Seluruh Indonesia

Peliput: Lisna

JAKARTA, BP-Pemerintah kembali menegaskan pentingnya deteksi dini sebagai langkah paling efektif dalam menurunkan risiko kematian akibat kanker. Imbauan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam acara peringatan Hari Kanker Sedunia di RS Kanker Dharmas, Jakarta, Rabu (04/02/2026).

Dalam kesempatan itu, Budi menyebutkan bahwa kemajuan teknologi medis selama dua dekade terakhir membuat kanker tidak lagi menjadi vonis mematikan. Ia menekankan perlunya mengubah persepsi masyarakat bahwa pemeriksaan kanker adalah sesuatu yang menakutkan.

"Kanker sekarang itu bisa disembuhkan. Cancer is curable. Tidak perlu takut memeriksakan diri," kata Budi, mengajak masyarakat lebih berani melakukan skrining.

Menurut Menkes, deteksi kanker pada stadium awal dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan hingga lebih dari 90 persen, sebagaimana ditunjukkan berbagai studi internasional. Hal itu selaras dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menempatkan skrining sebagai strategi pertama pengendalian kanker global.

Untuk mendukung percepatan deteksi dini, pemerintah menggelar layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 280 juta penduduk

Indonesia melalui program Presiden Prabowo. Salah satu prioritas utamanya adalah skrining kanker payudara bagi perempuan usia di atas 30 tahun.

Budi menambahkan bahwa pemerintah sudah menyebarkan 10.000 alat ultrasonografi (USG) ke puskesmas dalam tiga tahun terakhir. Selain pendistribusian alat, tenaga medis juga mendapat pelatihan khusus. "Dokter umum kini dapat melakukan skrining awal dengan standar yang terlatih," ujarnya.

Selain itu, fasilitas penanganan lanjutan seperti kemoterapi telah tersedia di 514 rumah sakit di Indonesia. Keberadaan layanan tersebut diharapkan mempermudah pasien memperoleh terapi tanpa harus dirujuk ke luar daerah.

Sejumlah kebijakan itu selaras dengan upaya global yang juga memerangi kanker melalui deteksi dini. Pada 2020, WHO mencatat lebih dari 19 juta kasus kanker baru di seluruh dunia, sedangkan lebih dari 10 juta orang meninggal akibat penyakit tersebut. Indonesia sendiri mencatat peningkatan kesadaran skrining sejak 2018, terutama setelah kampanye deteksi dini kanker payudara dan serviks digencarkan.

Budi menegaskan bahwa ketakutan masyarakat sering menjadi penghalang utama keberhasilan penanganan kanker. "Jangan lagi ada rasa khawatir yang membuat kita menunda skrining," tegasnya.

Ia mengingat-

kan bahwa sejumlah negara berhasil menurunkan angka kematian kanker berkat deteksi dini. Amerika Serikat misalnya, mencatat penurunan kematian akibat kanker payudara hingga 43 persen sejak 1989 berkat kampanye skrining massif. Indonesia diharapkan dapat mengikuti tren positif tersebut melalui fasilitas yang kini semakin merata.

Peringatan Hari Kanker Sedunia tahun ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga. RS Kanker Dharmas tercatat sebagai pusat kanker nasional yang sejak 1993 menjadi rujukan pengobatan kanker di Indonesia dan terlibat dalam banyak program edukasi masyarakat.

Pemerintah berharap peningkatan akses skrining dapat menciptakan perubahan perilaku masyarakat, dari menunggu gejala muncul menjadi memeriksakan diri secara proaktif. Upaya ini juga diklaim sebagai strategi jangka panjang untuk menekan beban ekonomi akibat kanker, yang secara global diperkirakan mencapai USD 1,6 triliun setiap tahun.

Dengan seluruh fasilitas yang telah tersedia, Budi menutup dengan ajakan agar masyarakat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal. "Kanker bisa diobati bila ditemukan lebih cepat. Pemeriksaan adalah langkah kecil namun sangat menentukan," katanya. (*)

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <p>PT FAREN GRAFIKA</p> <p>Harian Pagi Baubau Post</p> <p>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p> | <p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Amat Jr Korlip: Noval Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Firman</p> | <p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin</p> | <p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p> | <p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: Rahim Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p> |
| <p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p> | | | | |

Kasus Siswa SD Bunuh Diri di NTT Jadi Alarm Serius Dunia Pendidikan



Laporan: Alwan

NTT-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menilai kasus bunuh diri seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai peristiwa yang memerlukan perhatian mendalam dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Insiden tersebut menjadi cerminan nyata bahwa tekanan psikososial pada anak masih kerap terabaikan.

Peristiwa tragis itu terjadi pada Kamis (29/1) ketika korban ditemukan tergantung di dahan pohon cengkeh dekat pondok tempat ia tinggal bersama neneknya. Temuan itu menggugah warga setempat dan memicu respons cepat aparat kepolisian yang kemudian menemukan sepucuk surat tulisan tangan diduga ditujukan kepada ibunya korban.

Dalam surat berbahasa Ngada tersebut, korban menulis permohonan agar sang ibu merelakannya. Surat itu juga memuat pesan agar sang ibu tidak mencari atau menangisnya, serta ditutup dengan gambar menyerupai emoji wajah menangis. Polisi menduga isi surat

itu berkaitan erat dengan kondisi emosional korban sebelum mengakhiri hidupnya.

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa korban sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku tulis dan pena. Namun, sang ibu tidak dapat memenuhi permintaan sederhana itu karena keterbatasan ekonomi keluarga. Situasi tersebut menjadi salah satu dugaan pemicu tekanan psikologis yang tidak tertangani.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen-dikdasmen), Atip Latipulhayat, menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut. "Kejadian ini sangat serius dan menjadi pengingat bahwa kesejahteraan psikososial anak adalah isu kompleks yang harus ditangani lintas sektor," ujarnya, Rabu (4/2).

Ia menegaskan bahwa Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban, termasuk jaminan keberlanjutan pendidikan bagi saudara korban yang masih bersekolah.

Selain itu, kemen-

terian juga menjalin koordinasi dengan berbagai institusi sosial untuk memastikan keluarga memperoleh akses layanan sosial yang memadai. "Kami menyampaikan empati kepada keluarga, teman, guru, dan semua warga sekolah yang terdampak," tambah Atip.

Korban diketahui merupakan penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) yang dananya telah tersalurkan sesuai mekanisme. Namun, Atip menegaskan bahwa perlindungan anak tidak cukup berhenti pada bantuan finansial. "Anak-anak dari keluarga rentan membutuhkan pendampingan psikososial dan lingkungan yang suportif," tuturnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi terbuka antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. "Setiap anak harus merasa aman untuk mengungkapkan kerentanan mereka," kata Atip. Ia menilai penguatan kepedulian terhadap kondisi emosional anak harus menjadi agenda bersama.

Dari kesaksian ibunya korban, MGT (47), anaknya sempat menginap di rumah sebelum kejadian. Pada pagi harinya, ia meminta tukang ojek mengantar korban ke

pondok neneknya. Ia mengaku memberikan nasihat agar anaknya tetap rajin bersekolah, meski di tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas. Tragedi ini menambah daftar kasus bunuh diri yang melibatkan anak di Indonesia. Data Komnas Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kasus bunuh diri anak meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar dipicu tekanan ekonomi, bullying, hingga depresi yang tidak terdeteksi.

Secara global, fenomena serupa turut menjadi perhatian dunia. Laporan WHO 2023 mencatat bahwa bunuh diri merupakan penyebab kematian nomor dua bagi anak usia 10-14 tahun secara internasional. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan juga pernah mencatat lonjakan kasus bunuh diri anak akibat tekanan akademik dan sosial.

Para pengamat pendidikan menilai kejadian di NTT harus menjadi momentum evaluasi sistem perlindungan anak, terutama bagi wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Penguatan layanan konseling, perlindungan sosial, serta peningkatan kesadaran masyarakat dinilai sangat penting untuk mencegah kasus serupa terulang.

Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi, tekanan batin, dan lemahnya lingkungan pendampingan dapat menjadi kombinasi mematikan bagi anak. Pemerintah diharapkan menjadikan peristiwa ini sebagai alarm untuk memperkuat intervensi dini dan sistem perlindungan anak di seluruh Indonesia. (*)

Presiden Instruksikan Evaluasi Bansos Usai Tragedi Siswa SD di NTT

JAKARTA-Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dipicu persoalan keterbatasan ekonomi. Presiden meminta kementerian terkait melakukan langkah cepat dan menyeluruh untuk mencegah tragedi serupa kembali terjadi.

Instruksi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2). Prasetyo menegaskan bahwa Presiden menaruh empati dan duka mendalam atas kehilangan nyawa anak berusia sekolah dasarnya karena tidak mampu membeli alat tulis.

"Bapak Presiden menaruh atensi penuh dan meminta kami berkoordinasi agar kejadian seperti ini tidak terulang," ujar Prasetyo.

Pernyataan tersebut muncul setelah polisi memastikan bahwa siswa SD asal Ngada itu ditemukan tewas tergantung pada Kamis (29/1) lalu di dekat pondok tempat ia tinggal bersama neneknya. Kejadian tragis itu disebut berawal dari permintaan korban kepada sang ibu untuk membeli buku tulis dan pena, namun tidak dapat dipenuhi karena tidak ada uang.

Dalam penyelidikan di lokasi kejadian, aparat menemukan sepucuk surat yang ditulis tangan dalam bahasa Ngada. Surat tersebut diduga ditujukan kepada ibunya, berisi permintaan agar sang ibu merelakannya pergi lebih dahulu dan tidak bersedih. Pada bagian akhir, korban bahkan menggambar emoji wajah menangis.

Prasetyo menuturkan pemerintah langsung bergerak melakukan koordinasi dengan kementerian lain. "Kami sudah berkoordinasi dengan Mendagri dan Mensos terkait penanganan keluarga korban sekaligus melakukan evaluasi agar peristiwa ini tidak terulang," katanya.

Data awal kepolisian menyebut korban sempat menginap di rumah ibunya, MGT (47), sehari sebelum

datanya. Pagi harinya sekitar pukul 06.00, ibunya meminta tukang ojek mengantar korban kembali ke pondok neneknya yang telah berusia sekitar 80 tahun. Sebelum berpisah, sang ibu bahkan memberikan nasihat agar anaknya tetap rajin sekolah. "Kondisi ekonomi kami memang terbatas," demikian pengakuan ibu korban dalam pemeriksaan kepolisian.

Pemerintah menilai tragedi ini menjadi alarm keras bagi sistem perlindungan sosial. Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah akan meninjau kembali basis data penerima bantuan. "Ke depan, kami mengevaluasi agar bantuan tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak usia sekolah dari keluarga rentan," katanya.

Secara historis, kasus bunuh diri anak akibat tekanan ekonomi bukan fenomena baru di Indonesia maupun dunia. Di Indonesia, Komnas Perlindungan Anak mencatat beberapa kasus serupa pada kurun 2018-2023, termasuk anak yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membayar iuran sekolah atau membeli seragam. Di tingkat global, UNICEF pada 2021 juga merilis laporan bahwa kemiskinan ekstrem menjadi salah satu faktor risiko tertinggi bunuh diri pada anak dan remaja di negara berkembang.

Di NTT sendiri, ketimpangan akses pendidikan dan kemiskinan ekstrem masih menjadi masalah struktural. Data BPS 2023 menunjukkan NTT termasuk lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kondisi ini membuat banyak anak berada dalam situasi rentan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar sekolah.

Tragedi di Ngada ini memantik keprihatinan publik sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan sosial yang merata hingga pelosok. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi komprehensif agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan akibat kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan dasar. (*)

Bea Cukai Disorot, KPK Tangkap Pejabat dan Sita Emas Serta Uang Miliaran

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menasar pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rabu (4/2/2026). Dari operasi tersebut, lembaga antirasuah mengamankan uang tunai dalam berbagai mata uang dan logam mulia seberat sekitar 3 kilogram.

Penindakan itu menjadi sorotan publik lantaran Bea dan Cukai merupakan salah satu institusi dengan peran strategis dalam pengawasan barang impor. KPK menilai transaksi ilegal yang terkait dengan arus barang masuk memiliki risiko besar terhadap potensi kerugian negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, men-

ampaikan bahwa barang bukti utama yang diamankan adalah uang rupiah, valuta asing, dan emas batangan. "Untuk uang tunai nilainya mencapai miliaran rupiah, sementara logam mulia yang kami sita sekitar tiga kilogram emas," ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Ia menambahkan

bahwa operasi tersebut berkaitan dengan prosedur pemasukan barang dari luar negeri. Namun, jenis barang impor yang diduga menjadi objek permainan oknum pejabat masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

"Kami belum dapat menyampaikan detail barang apa saja yang terlibat. Informasi lengkapnya akan kami up-

date setelah pemeriksaan awal selesai," kata Budi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengkonfirmasi bahwa tim penyidik telah memeriksa sejumlah pejabat Bea Cukai sejak siang hingga malam hari. Ia menegaskan bahwa kegiatan OTT ini merupakan bagian dari penguatan kembali agenda pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik.

"Ya, benar ada OTT. Tim masih bekerja," ungkap Fitroh saat dikonfirmasi terpisah.

Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memastikan bahwa pemeriksaan oleh KPK sedang berlangsung. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaganya menghormati proses hukum yang berjalan. "Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap pejabat Bea Cukai oleh Tim KPK," tulisnya da-

lam keterangan resmi.

Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan oknum aparat Bea Cukai. Secara historis, lembaga tersebut sudah beberapa kali terseret kasus serupa, termasuk penangkapan pegawai di Batam pada 2016 dan Skandal fasilitas impor pada awal 2000-an yang pernah mencuatkan reformasi besar-besaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam konteks global, praktik suap sektor kepabeanan bukan hal baru. Transparency International dalam laporan tahunannya menyebutkan bahwa sektor kepabeanan menjadi salah satu dari lima sektor paling rentan korupsi di dunia, terutama di negara-negara dengan volume perdagangan internasional tinggi.

OTT terhadap pejabat Bea Cukai ini juga merupakan penindakan kedua KPK pada hari yang sama. Sebelumnya, lembaga itu

menangkap seorang pimpinan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. KPK menyebut rangkaian operasi ini sebagai bagian dari penguatan kembali upaya represif lembaga dalam menindak kasus korupsi struktural.

Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum merinci jumlah uang secara keseluruhan maupun jumlah pejabat yang diamankan. Proses gelar perkara dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat sebelum lembaga tersebut mengumumkan status hukum para pihak yang diperiksa.

KPK menegaskan akan terus mengawasi integritas lembaga pelayanan publik, terutama yang berkaitan langsung dengan mekanisme fiskal dan pengawasan perdagangan internasional. "Kami pastikan perkembangan baru akan kami sampaikan kepada masyarakat," pungkas Budi. (*)

Paripurna DPRD Baubau Sahkan Materi Pokok Masa Sidang II



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau resmi menetapkan materi pokok kegiatan untuk Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 melalui rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD. Penetapan agenda ini menjadi fondasi kerja legislatif untuk periode Februari hingga Mei 2026.

Keputusan tersebut sekaligus menandai berakhirnya Masa Sidang I yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026. DPRD memandang perlu adanya kesinambungan program agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tetap terukur dan berjalan efektif sepanjang tahun.

Sekretaris DPRD Kota Baubau, Yaya Wirayahman, S.STP., M.KP., mengatakan bahwa penyusunan materi pokok kegiatan disusun berdasarkan regulasi nasional yang relevan. "Penetapan ini bukan sekadar ritual administratif, tetapi komitmen agar setiap keputusan DPRD selaras dengan kebutuhan warga Baubau," ujarnya.

Agenda Masa Sidang

II menitikberatkan pada pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dinilai mendesak untuk penyelesaian produk hukum daerah. DPRD menilai sejumlah regulasi baru dibutuhkan untuk menjawab tantangan pembangunan di awal tahun.

Dalam bidang pengawasan, DPRD akan memantau pelaksanaan program pembangunan triwulan pertama dan kedua. Evaluasi akan difokuskan pada kesesuaian pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada APBD 2026.

Selain pembahasan legislasi dan pengawasan, penyerapan aspirasi masyarakat menjadi salah satu misi utama DPRD pada periode ini. DPRD menargetkan intensifikasi komunikasi politik melalui kunjungan lapangan dan forum dialog publik.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan agenda kerja tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Sekretaris DPRD juga menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menjalankan fungsi pemerintahan. "Seluruh alat kelengkapan dewan harus tancap gas dalam Masa Sidang II ini agar capaian legislasi dan pengawasan dapat selesai tepat waktu," katanya.

Agenda paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Baubau Natas Aryu Prawira Tamin, SM., MM., serta Adriansyah Farmin, ST. Dari unsur eksekutif hadir Asisten II Setda Kota Baubau, Dr. Dahrul Dahlan, S.STP., M.Si., mewakili Sekda Kota Baubau. Selain itu, unsur Forkompinda dan pejabat eselon II dan III lingkup Pemkot Baubau juga hadir.

Secara historis, penetapan agenda masa sidang merupakan tradisi dalam sistem parlementer modern yang berkembang sejak abad ke-19, ketika parlemen Inggris mulai merapikan kalender legislasi untuk memastikan akuntabilitas publik. Di Indonesia, pengaturan

masa sidang diperkuat sejak masa reformasi 1998 dengan pembentukan berbagai undang-undang pemerintahan daerah.

Pakar tata kelola pemerintahan menilai bahwa penyusunan agenda sidang yang terukur berperan besar dalam stabilitas pembangunan daerah. Di banyak negara, seperti Jepang dan Korea Selatan, konsistensi agenda legislatif tahunan menjadi faktor kemajuan daerah karena memastikan sinkronisasi antara kebijakan eksekutif dan keputusan legislatif.

DPRD Baubau berharap pola kerja serupa dapat diterapkan dalam Masa Sidang II tahun ini. "Harapannya, seluruh program dapat berjalan harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah demi percepatan pembangunan," tambah Yaya dalam kesempatan tersebut.

Penetapan ini menjadi titik awal dimulainya rangkaian pembahasan strategis yang akan memengaruhi arah kebijakan Kota Baubau sepanjang 2026, termasuk aspek pembangunan ekonomi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. (*)

Menuju 2030, Kominfo Baubau Mantapkan Strategi Digital Pemerintah



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Baubau menegaskan komitmen memperkuat arah transformasi digital dan keamanan siber pada awal 2026 melalui rapat evaluasi kinerja pegawai yang digelar Rabu (04/02/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pertemuan tersebut dipimpin Kepala Dinas Kominfo Baubau, H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si., bersama Sekretaris Dinas, Dr. Hamzah, SH., M.I. Kom. Keduanya meminta seluruh pegawai memahami kembali garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis bidang masing-masing.

Hamzah menegaskan bahwa Diskominfo sedang mengarah pada pola perencanaan jangka panjang hingga 2030. Ia menyebut perencanaan tersebut harus diperkuat sejak awal tahun agar perangkat daerah bergerak dalam jalur yang sama. "Kita tidak boleh berjalan dengan standar yang berbeda. Tujuan 2030 harus dipahami mulai hari ini," ujarnya dalam rapat.

Fokus pembahasan pada awal Februari tersebut tidak hanya meninjau capaian Januari, tetapi juga menata ulang pendekatan digitalisasi pemerintahan. Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berba-

sis Elektronik (SPBE) menjadi prioritas utama yang diklaim sebagai fondasi modernisasi pelayanan publik.

Diskominfo bahkan berencana memperkuat regulasi standar pengadaan aplikasi dan perangkat teknologi informasi. Setiap pengadaan perangkat oleh organisasi perangkat daerah harus melalui verifikasi teknis. "Mulai tahun ini, seluruh pengadaan IT wajib masuk meja Kominfo untuk verifikasi spesifikasi," kata Hamzah menegaskan.

Selain itu, keamanan siber menjadi sorotan besar menyusul meningkatnya ancaman global. Sepanjang 2024-2025, Indonesia menjadi salah satu negara dengan serangan siber tertinggi di Asia Tenggara. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 300 juta anomali serangan dalam setahun. Hal ini semakin mendorong Pemkot Baubau mengubah pendekatan pengamanan dari pasif menjadi aktif.

Menurut Hamzah, pola lama tidak lagi relevan. Tahun ini Kominfo akan menerapkan pemantauan masif terhadap seluruh aplikasi pemerintah. "Kita tidak bisa hanya menunggu sistem bermasalah. Keamanan siber sekarang harus aktif, cepat dan tegas," ujar Hamzah dalam kutipan lainnya.

Langkah penguatan juga mencakup pengelolaan informasi publik dan peningkatan kualitas konten pada kanal resmi pemerintah, seperti Facebook, TikTok dan Instagram. Upaya ini

dilakukan untuk menjaga citra positif pemerintah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.

Secara historis, penguatan informasi publik telah menjadi tren global sejak 2018 ketika banyak pemerintah memperketat aturan keterbukaan data akibat meningkatnya isu misinformasi di media sosial. Hal ini juga terjadi di Indonesia saat beberapa daerah mulai membentuk pusat pengendalian informasi digital. Diskominfo Baubau mengikuti arus tersebut dengan menekankan ketegasan memilah informasi terbuka dan data yang dikecualikan sesuai regulasi.

Evaluasi kinerja bulanan menjadi sistem yang terus dijaga oleh Diskominfo. Pertemuan Februari ini akan dibandingkan kembali pada rapat evaluasi berikutnya, Maret 2026. Siklus ini diterapkan untuk memastikan standar kinerja pegawai tetap optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Dinas Dr. Hamzah menambahkan bahwa evaluasi kontinuitas wajib menjadi budaya kerja. "Kita ingin standar pelayanan yang tidak turun di tengah jalan. Evaluasi ini adalah kontrol kualitas," ujarnya.

Rangkaian upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat struktur tata kelola digital Pemerintah Kota Baubau dan memastikan transisi menuju pemerintahan modern yang aman, terukur, dan akuntabel hingga 2030. (*)

Dinkes Bersama Kementerian Haji dan Umrah Baubau Sinergi Siapkan CJH Hadapi Cuaca Ekstrem

Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Kesiapan fisik dan mental calon jamaah haji (CJH) kembali menjadi fokus utama pemerintah menjelang musim haji 1447 H/2026 M. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Baubau bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) memperkuat sinergi melalui bimbingan manasik kesehatan yang digelar di Aula Kantor Kemenag Baubau pada Selasa, 3 Februari 2026.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah tersebut, aspek kesehatan ditempatkan sebagai fondasi utama mengingat tuntutan fisik ibadah haji yang semakin kompleks. Panitia menekankan

bahwa kesiapan jamaah bukan hanya pada pemahaman manasik, tetapi juga kemampuan tubuh beradaptasi dengan kondisi ekstrem di Arab Saudi.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Baubau, Yuslina, S.Kes., M.Si., hadir sebagai pemateri utama dan menyoroti pentingnya pembiasaan pola hidup sehat sejak sebelum keberangkatan. "Haji adalah ibadah fisik. Untuk mencapai haji mabrur, jamaah harus mantap iman, mantap ilmu, dan mantap kesehatan," ujarnya mewakili Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau.

Dinkes menyampaikan bahwa perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi dapat menimbulkan

risiko kesehatan seperti dehidrasi, heat stroke, dan infeksi menular. Oleh karena itu, edukasi mitigasi menjadi salah satu pilar penting yang diberikan kepada jamaah agar mampu mengantisipasi potensi masalah selama berada di Tanah Suci.

Selain itu, pendekatan edukasi ramah lansia disiapkan secara khusus. Mengingat persentase jamaah lanjut usia terus meningkat setiap tahun, Dinkes Baubau memberi penekanan pada teknik pendampingan dan langkah untuk menjaga kemandirian lansia selama menjalani seluruh rangkaian ibadah.

Pembahasan juga mencakup pengelolaan penyakit bawaan seperti hipertensi dan diabetes yang kerap menjadi

hambatan kesehatan jamaah. "Jamaah harus memahami cara menjaga kondisi penyakit bawaan tetap stabil agar tidak mengganggu ibadah," kata Yuslina dalam sesi penyuluhan.

Demi mencegah penyakit infeksi, Dinkes mengingatkan pentingnya vaksinasi dan perlindungan diri karena jamaah akan berinteraksi dengan jutaan orang dari berbagai negara. Potensi penyebaran infeksi pernapasan sangat tinggi, terlebih pada saat wukuf, melontar jumrah, dan tawaf.

Manasik kesehatan kali ini diharapkan dapat menjadi titik awal perubahan pola hidup yang lebih baik. Jamaah diminta mulai melakukan latihan fisik ringan, mengatur pola

tidur, serta menjaga asupan nutrisi agar tubuh terbiasa sebelum menghadapi cuaca ekstrem. "Tubuh tidak boleh kaget ketika tiba di Arab Saudi, dan persiapan harus dimulai dari sekarang," tutur Yuslina.

Peningkatan kesiapan kesehatan jamaah bukanlah hal baru dalam sejarah penyelenggaraan haji. Secara nasional, pendekatan istithaah mulai menjadi syarat wajib sejak 2017 setelah pemerintah mencatat tingginya angka jamaah yang mengalami gangguan kesehatan berat di Arab Saudi. Secara global, Organisasi Kesehatan

Dunia (WHO) juga sejak 2015 menekankan pentingnya kesiapan fisik dalam ibadah haji karena kondisi cuaca yang dapat mencapai lebih dari 50°C.

Di tingkat internasional, Arab Saudi juga terus memperluas layanan kesehatan haji sejak 1983, termasuk pembangunan rumah sakit khusus haji, pendingin di area masyair, dan penguatan sistem tanggap darurat. Data historis ini menunjukkan bahwa kesiapan kesehatan adalah isu global yang menjadi perhatian banyak negara pengirim jamaah.

Melalui edukasi kesehatan yang terstruktur,

Kemenag dan Dinkes Baubau menargetkan terwujudnya Istithaah Kesehatan, yaitu kemampuan jamaah secara fisik dan mental untuk menjalankan seluruh ibadah. Hasil dari proses ini diharapkan menghasilkan jamaah yang lebih mandiri, sehat, dan mampu melaksanakan ibadah secara optimal.

"Kami ingin seluruh jamaah Baubau berangkat dalam kondisi sehat, menjalankan ibadah maksimal, dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur serta kesehatan tetap terjaga," tutup Yuslina, menegaskan komitmen pihaknya. (*)